



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU RENCANA STRATEGIS

**KAPUAS HULU  
SEMAKIN HEBAT**

## KECAMATAN HULU GURUNG

**Tahun 2025 - 2029**





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka penyusunan Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Hulu Gurung periode 2025 – 2029 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Hulu Gurung dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) dan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Melalui renstra ini, kami akan menyusun Renja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dalam mengemban tugas di era Otonomi Daerah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan Dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Nanga Tepuai , Juni 2025

Camat Hulu Gurung,



Drs. H. BAHARUDIN  
PEMBINA TK I

NIP. 19670718 199503 1 002



	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1 Latar Belakang	3
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya	7
	1.4 Maksud dan Tujuan	9
	1.3.1 Maksud	9
	1.3.2 Tujuan	9
	1.5 Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	12
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	12
	2.2 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	13
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
	3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	19
	3.2 Struktur Organisasi	20
	3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	22
	3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI</b>	
	4.1 Visi	34
	4.2 Misi	36
<b>BAB V</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	5.1 Tujuan	38
	5.2 Sasaran	39
	5.3 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	41



---

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>43</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>55</b>





---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, sudah seharusnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom dapat dijalankan secara baik dan berkesinambungan serta dapat memenuhi tuntutan akan pelayanan masyarakat. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Besarnya tuntutan masyarakat akan terwujudnya tingkat kesejahteraan dalam segala dimensi kehidupan dalam era otonomi daerah saat ini merupakan suatu hal yang wajar, karena pada prinsipnya pembangunan sebagai salah satu tugas pokok pemerintahan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya untuk merespon hal tersebut tentu memerlukan sebuah pengelolaan organisasi pemerintahan yang baik dan strategis serta mampu merespon segala bentuk kebutuhan pembangunan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai suatu pemerintah daerah otonom dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah telah membentuk lembaga teknis daerah Kecamatan perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang diperlukan bagi masyarakat dan perkembangan zaman.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu termasuk di dalamnya Kecamatan Hulu Gurung sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kecamatan Hulu Gurung mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/Desa Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta





Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi Tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Hulu Gurung mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Hulu Gurung melalui penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung periode 2025 – 2029.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, sejumlah peraturan perundang – undangan yang digunakan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/ 2020 / SJ tanggal 11 Agustus Tahun 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.





17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

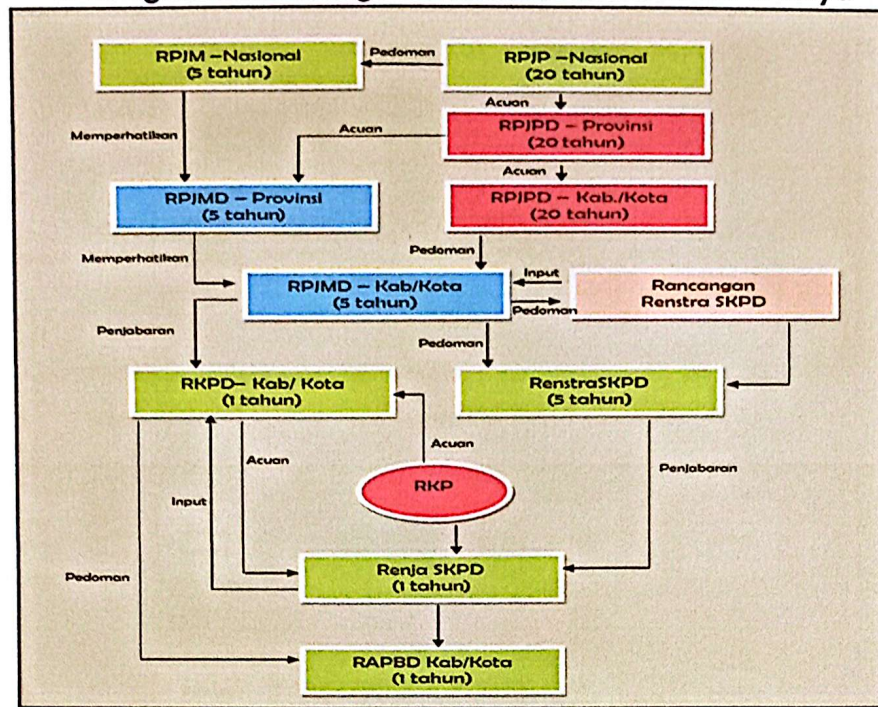
### **1.3 Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.**

Agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas yang baik dalam perencanaan pembangunan, maka Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Adapun alur pikir dalam penyusunan Rencana Strategis dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :



Gambar I.1.  
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

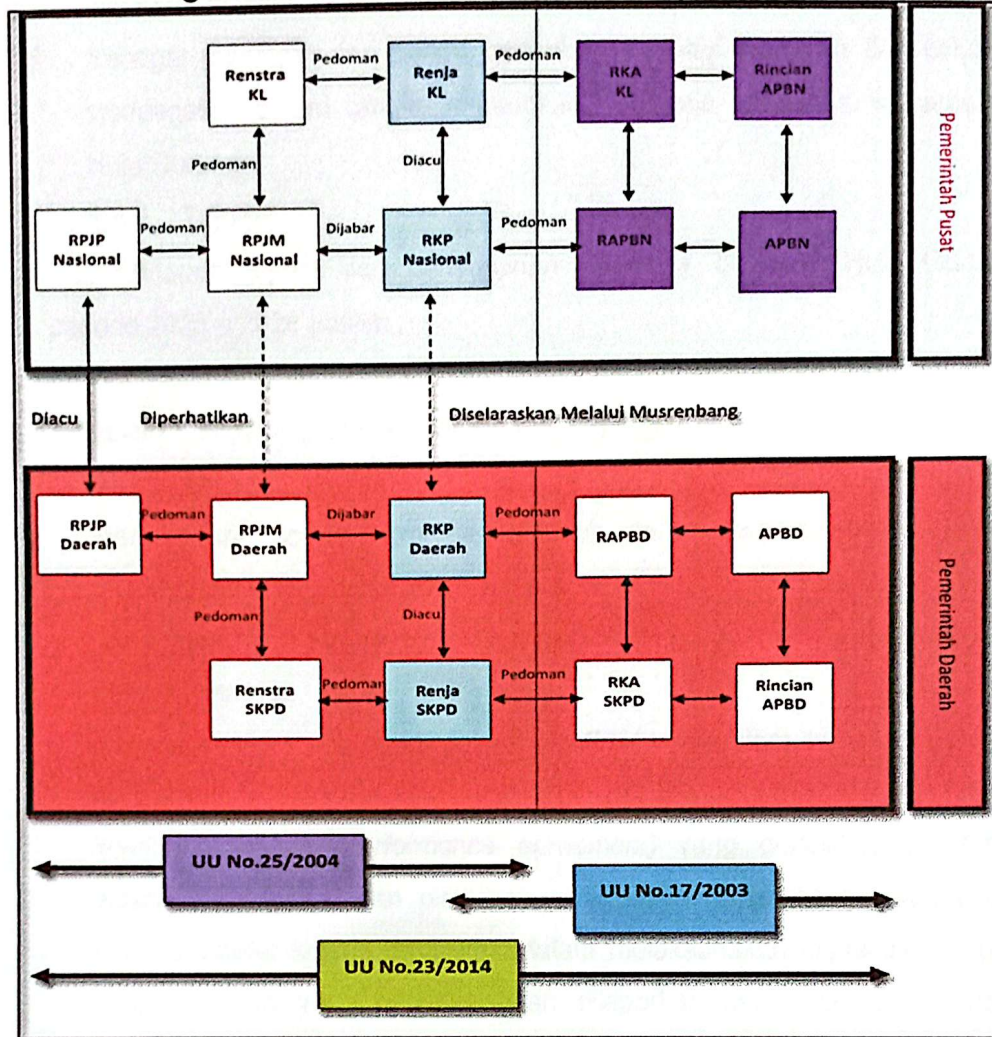


Secara garis besar, Rencana Strategis ( Renstra ) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat ditunjukkan sesuai gambar berikut:





Gambar 1.2.  
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Anggaran



## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Adapun maksud daripada Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Hulu Gurung periode 2025 – 2029 adalah :

- Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staff/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan





bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

- 1.6 Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Hulu Gurung .

#### **1.4.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Startegis Hulu Gurung periode 2025 – 2029 adalah :

- a. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Hulu Gurung dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2025 – 2029.
- b. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
- c. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renstra Kecamatan Hulu Gurung yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2025 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Hulu Gurung.
- BAB II GAMBARAN UMUM**, menjelaskan tentang kondisi Kecamatan Hulu Gurung secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi (ii) demografi, (iii) ) pelayanan umum.
- BAB III GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, struktur perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah , tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- BAB IV VISI, MISI**, dalam bab ini menjelaskan tentang visi, misi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.
- BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**, Dalam bab ini disajikan Permasalahan Pembangunan dan Isu strategis dalam pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB VI TUJUAN DAN SASARAN**, dalam bab ini dipaparkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah



---

**BAB VII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

**BAB VIII PENUTUP**, Bab ini menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dengan memasukkan program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.





---

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Hulu Gurung merupakan salah satu wilayah administrasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang berbatasan dengan beberapa kecamatan sekitar. Dalam melaksanakan pembangunan daerah selama ini, Pemerintah Kecamatan Hulu Gurung berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai potensi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam iringan pelaksanaan pembangunan selama ini, berbagai tantangan dan kendala telah dihadapi oleh segenap elemen pembangunan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perencanaan pembangunan yang nantinya akan dirumuskan sebagai panduan pelaksanaan pembangunan periode 2025-2029, memiliki posisi penting dalam perwujudan tujuan pembangunan kecamatan. Oleh karena itu, perlu adanya pijakan analisis kebijakan pembangunan untuk kemudian menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan. Pijakan analisis kebijakan dalam pembangunan adalah potret kehidupan masyarakat yang terlihat dari gambaran umum kondisi daerah. Sehingga dalam rumusan Renstra ini memiliki fokus untuk mendukung program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih untuk kemudian akan dilaksanakan secara terstruktur agar hasil pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung. Berikut gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Penjabaran kondisi geografis akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kecamatan Hulu Gurung dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Berikut penjabaran kondisi geografis Kecamatan Hulu Gurung.



### **2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah**

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kecamatan Hulu Gurung . Karakteristik lokasi dan wilayah akan menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kecamatan Hulu Gurung .

#### **2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi**

Secara administratif posisi geografis Kecamatan Hulu Gurung yang merupakan bagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, secara astronomis terletak pada koordinat 0°35' Lintang Utara sampai 0°46' Lintang Utara dan di antara 112°22' sampai 114°38' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jongkong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Boyan Tanjung dan Kecamatan Silat Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pengkadan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selimbau dan Kecamatan Seberuang .

Kecamatan Hulu Gurung merupakan kecamatan dengan luas wilayah 432,90 Km<sup>2</sup>, setara dengan 1,45 % dari luas Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan yang mencapai 28.842 km<sup>2</sup>. Terdiri dari 15 Desa dan 45 Dusun, dari 15 desa yang ada, Desa Tani Makmur, Landau Kumpang dan Lubuk Antuk merupakan tiga desa yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas masing-masing 43,56 km<sup>2</sup>, 38,90 km<sup>2</sup> dan 36,27 km<sup>2</sup> atau setara dengan 13,97 %, 13,37 % dan 12,83 % dari luas Kecamatan Hulu Gurung. Sedangkan Desa Sejahtera Mandiri merupakan desa dengan luas wilayah terkecil dimana luas wilayah desa tersebut 17,00 km<sup>2</sup> atau 7,42 luas wilayah Kecamatan Hulu Gurung .

Untuk lebih jelasnya tentang data Kecamatan, jumlah Desa dan luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Hulu Gurung , seperti pada tabel berikut ini.





**Tabel II.1.**  
**Jumlah Desa , Dusun dan RT beserta Luas Wilayahnya (Km<sup>2</sup>)**  
**Kecamatan Hulu Gurung**

No	Nama Desa	Dusun	RT	Luas (KM <sup>2</sup> )
1	Nanga Tepuai	3	6	19,13
2	Landau Kumpang	3	6	38,9
3	Karya Mandiri	3	6	33
4	Nanga Yen	3	6	30,46
5	Lubuk Antuk	3	6	36,27
6	Mubung	3	6	18
7	Parang	3	7	26
8	Tunas Muda	3	6	34,46
9	Sejahtera Mandiri	2	4	17
10	Kelakar	3	6	21,58
11	Beringin	3	6	25,25
12	Bugang	3	6	25,25
13	Simpang Senara	3	6	30,31
14	Mentawit	4	4	35
15	Tani Makmur	3	6	43,56
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>87</b>	<b>432,90</b>

*Sumber: Seksi Pemerintahan*

Gambaran data wilayah perdesa dapat dilihat pada peta administrative berikut ini:



Gambar II.1

**Peta Administratif Kecamatan Hulu Gurung**

*Sumber : Seksi Kesejahteraan Rakyat*

Demografi atau kependudukan mempelajari tentang penduduk terutama yang terkait dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan) penduduk. Kondisi demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Perkembangan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu dari karakteristik demografi yang terdiri dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi) penduduk. Bila dilihat dari jumlah penduduk serta kepadatannya di Kecamatan Hulu Gurung dibandingkan dengan luas wilayah yang ada masih sangat terbuka dalam pengembangan usaha untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. hal ini dapat dilihat dari table berikut ini:

**Tabel II.2**

**Jumlah Penduduk, Jenis Kelamin, Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk**

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah ( Km2 )	Kepadatan Penduduk ( km2 )
		Laki-laki	Perempuan			
1	Nanga Tepuai	663	679	1.342	19,13	69,46
2	Landau Kumpang	535	520	1.055	38,9	27,12
3	Karya Mandiri	605	559	1.164	33	35,27
4	Nanga Yen	621	570	1.191	30,46	39,10
5	Lubuk Antuk	517	501	1.018	36,27	28,06
6	Mubung	590	521	1.111	18	61,72
7	Parang	534	513	1.047	26	40,26
8	Tunas Muda	404	352	756	34,46	21,93





No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas Wilayah ( Km2 )	Kepadatan Penduduk ( km2 )
		Laki-laki	Perempuan			
9	Sejahtera Mandiri	202	223	429	17	25,23
10	Kelakar	358	361	719	21,58	33,31
11	Beringin	360	315	675	25,25	26,73
12	Bugang	450	445	895	25,25	35,44
13	Simpang Senara	412	429	841	30,31	27,74
14	Mentawit	570	583	1.153	35	32,94
15	Tani Makmur	566	496	1.062	43,56	24,38
Jumlah		7.387	7.067	14.454	432,90	33,38

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu , Hulu Gurung Dalam Angka tahun 2024*

Dengan luas wilayah 432,90 km, jumlah penduduk di Kecamatan Hulu Gurung pada Tahun 2024 mencapai 14.454 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.387 jiwa dan perempuan sebanyak 7.067 jiwa. Desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni Desa Nanga Tepuai yang mencapai 1.342 jiwa dengan persentase sebesar 69,46 persen dari total penduduk yang ada di Kecamatan Hulu Gurung. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Desa Tunas Muda dengan jumlah penduduk yang tinggal sebanyak 756 jiwa atau 21,93 persen dari total keseluruhan penduduk yang ada.

#### **2.1.1.2. Topografi**

Secara umum Kecamatan Hulu Gurung merupakan daerah dataran tinggi dan berbukit . Sebagian besar wilayah Kecamatan Hulu Gurung memiliki ketinggian antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah sub tropis dan tropis. Bentuk permukaan lahan datar dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran rawa daerah aliran Sungai Tepuai dan Sungai Embau, sedangkan lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan mempunyai kemiringan 2% - 15%.



#### **2.1.1.3. Penggunaan lahan**

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman.

#### **2.1.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah**

Sesuai Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Agropolitan Silat Hilir dan sekitarnya yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Kawasan Ekowisata Taman Nasional Danau Sentarum yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan dan ekonomi; dan
- c. Kawasan Koridor Taman Nasional Danau Sentarum dengan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan lingkungan.

Terakhir pada tahun 2021 seiring dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka ditetapkan Kawasan Agropolitan Hijau Embau ( KAPAHE ) yang meliputi Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Pengkadan.

#### **2.1.1.5 Pertanian**

Kecamatan Hulu Gurung yang memiliki wilayah cukup luas sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Pembangunan pertanian tanaman pangan terus ditingkatkan untuk mencapai swasembada pangan daerah, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui penganekaragaman jenis bahan pangan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pemanfaatan lahan.

Untuk Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kecamatan Hulu Gurung diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan





---

rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.



---

## **BAB III**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan.
- Pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
- Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penetapan rencana operasional kecamatan.
- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
- Pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pembinaan wilayah.





- Pemberian petunjuk dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kecamatan secara periodik.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3.2 Struktur Organisasi**

Profil organisasi bermanfaat bagi penentuan kompetensi (kemampuan) serta kelemahan-kelemahan suatu organisasi yang sifatnya strategis/menentukan, sehingga dapat diketahui apakah hasil yang dicapai konsisten dengan visi dan tujuan organisasi. Setiap organisasi tidak mustahil akan selalu menghadapi adanya keterbatasan kemampuan dalam menyediakan dan memperoleh sumber daya (*resources*) yang diperlukan, baik dalam hal dana (*money*), sarana dan prasarana (*machine and materials*) pelayanan, sumber daya manusia (*man*) serta mekanisme (*method*) dan ekspektasi (nilai-nilai yang diharapkan) oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi.

Dengan demikian sejauhmana kondisi-kondisi tersebut telah dapat terpenuhi perlu untuk dianalisis, sebab hal ini terkait dengan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi. Oleh sebab itu, dalam menentukan atau melihat profil organisasi sangat erat kaitannya antara harapan dengan kenyataan yang ada.

Struktur Organisasi Kecamatan Pengkadan terdiri dari :

1. Camat dengan Eselon III.a
2. Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan Eselon III.b, yang membawahi :
  - Kasubbag Program dan Keuangan dengan Eselon IV.b
  - Kasubbag Personil dan Umum dengan Eselon IV.b
3. Kepala Seksi Pemerintahan dengan Eselon IV.a
4. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dengan Eselon IV.a
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan Eselon IV.a
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Eselon IV.a
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



### Gambar 11.2

[illegible]

Halaman 21





### 3.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Terjadinya perubahan struktur organisasi juga mempengaruhi terhadap susunan kepegawaian dan perlengkapan yang juga dimiliki oleh Kecamatan Hulu Gurung, yang pada intinya juga akan berpengaruh kepada produktifitas dan efektifitas terhadap kinerja itu sendiri. Adapun hal-hal mempengaruhi antara lain:

#### 3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi.

Untuk susunan Pegawai dapat di lihat pada rincian di bawah ini :

1. Golongan IV : 1 Orang
2. Golongan III : 7 Orang
3. Golongan II : 5 Orang
4. Golongan I : - Orang
5. Pegawai PPPK : 3 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Personil

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ada di Kecamatan Hulu Gurung telah di lakukan pengiriman aparatur/pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan jabatan pegawai, jumlah pegawai dengan bentuk latihan/kursus-kursus yang telah di ikuti tersebut adalah sebagai berikut :

#### Perkembangan Pegawai Kecamatan Hulu Gurung Mengikuti Diklat Struktural

Tabel III. 1

No	JENIS DIKLAT	JUMLAH					KET
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Diklatpim Tingkat III SPAMA / PKA					1	
2	Diklatpim Tingkat IV	-			1		
	Jumlah	-			1	1	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Personil

#### 3.3.2 Sarana dan Prasarana.



Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Hulu Gurung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III. 2**  
**Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan**  
**Kecamatan Hulu Gurung**

N o	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
1	Gedung kantor	1 Unit	Rusak Berat	
2	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
3	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
4	Ruang Kasi	4 Ruang	1 baik 3 rusak	
5	Ruang Kasubbag	2 Ruang	1 Baik 1 rusak	
6	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
7	Ruang Telegram	2 Ruang	Rusak	
8	Toilet	1 Ruang	Baik	
9	Dapur	1 Ruang	Baik	
10	Gudang	1 Ruang	Baik	
11	Area Parkir	1 Ruang	Baik	
12	Ruang Pelayanan KTP	1 Ruang	Baik	

Sumber : Seksi Pembangunan

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Kecamatan Hulu Gurung dari selama 3 Tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Kondisi Sarana Pendukung**  
**Kecamatan Hulu Gurung**

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan Roda 2	10 unit	5 unit	5 unit	
2.	Laptop	7 unit	5 unit	2 unit	
3.	PC AIO HP	8 unit	6 unit	2 unit	
4.	Komputer	4 unit	-	4 rusak	
5.	Laptop	7 unit	4 unit	3 rusak	
6.	Filing besi/metal	2 Unit	-	2 unit	
7.	Papan Data	6 Buah	4 Buah	2 buah	





8.	Genset	2 Buah	1 Buah	1 buah	
9.	Kipas Angin	12 Buah	6 Buah	6 rusak	
10.	Mesin Ketik Standar	1 Buah	-	1 buah	
11.	Kursi Plastik	150 Buah	70 Buah	80 buah	
12.	Dispenser	1 Buah	-	1 buah	
13.	Printer	12 Buah	4 Buah	8 buah	
14.	Proyektor	1 Unit	1 Unit	-	
15.	Rak Kayu	3 Buah	3 Buah	-	
16.	Televisi	2 Buah	1 Buah	1 buah	
17.	Lemari Pakaian	1 Buah	-	1 Buah	
18.	Kursi Kerja	12 Buah	6 Buah	6 buah	
19.	Papan Pengumuman	1 Buah	1 Buah	-	
20.	Meja Kerja	20 Buah	19 Buah	1 Buah	
21.	Karpet	4 Buah	-	4 Buah	
22.	Kursi Putar	2 Buah	2 Buah	-	
23.	Kursi Lipat	6 Buah	-	6 buah	
24.	Jam Dinding	2 Buah	2 Buah	-	
25.	Brankas	1 Buah	-	1 Buah	
26.	Mesin Rumput	4 Buah	2 Buah	2 buah	
27.	Mesin Pompa Air	1 Buah	-	1 Buah	
28.	Lemari Arsip	2 Buah	2 Buah	-	
29.	Amplifier	2 Buah	1 Buah	1 Buah	
30.	Antena	2 Buah	-	2 Buah	
31.	Unit Transceiver SSB Potable	2 Unit	2 Unit	-	
32.	Wireless	2 Buah	1 Buah	1 Buah	

*Sumber : Bendahara Pengurus Barang*



### 3.3.3 Sumber Daya Keuangan

Salah satu sumber daya yang amat mendukung jalannya suatu organisasi adalah sumber daya keuangan yang dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggaran Kecamatan Hulu Gurung

Tabel III.4

**Jumlah Anggaran Kecamatan Hulu Gurung  
Kabupaten Kapuas Hulu**

No	RINCIAN ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN			KET
		2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6
5.1	<b>BELANJA</b>			<b>3.044.978.774</b>	
1.	Belanja Pegawai			2.256.707.174	
2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>507.071.600</b>	
3.	Belanja Hibah			220.000.000	
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			61.200.000	

Sumber : Sub Bagian Program dan Keuangan

### 3.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi guna mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu tertentu.

Strategi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk membangun di segala bidang melalui misi keempat Bupati/Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas





Berdasarkan data yang terdapat dalam profil Kecamatan Hulu Gurung sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tingkat kinerja pada Kecamatan Hulu Gurung dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.4.1 Sumber Daya Manusia**

Analisis kinerja Kecamatan Hulu Gurung jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu aparatur yang tersedia, maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai dengan tahun 2025 berdasarkan data yang ada, jumlah pegawai Kecamatan Hulu Gurung adalah sebanyak 29 Pegawai yang terdiri dari 19 PNS dan 10 PPPK. Jumlah ini jika dibandingkan dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka secara kuantitatif pegawai yang ada masih kurang.

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan II merupakan personil terbanyak. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Kecamatan Hulu Gurung berada dalam tahapan cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena Jabatan Kasi dan Kasubbag sudah terisi semua sedangkan golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup ataupun seorang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA keatas, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Dengan demikian dilihat dari struktur yang ada, maka kinerja sumber daya manusia berdasarkan kondisi kepangkatan yang ada sudah mencapai tingkatan 90 %. Demikian pula jika dilihat dari jumlah jabatan yang ada dengan jumlah formasi yang telah terisi, maka tingkat kinerjanya sudah mencapai 100 % karena semua jabatan struktural telah terisi oleh pejabatnya masing-masing.

Untuk menilai kinerja sumber daya manusia secara kualitatif, maka faktor pendidikan baik formal maupun kedinasan merupakan indikator yang harus dinilai. Dari data yang ada, maka sumber daya manusia pada Kecamatan Hulu Gurung 80 % berada dalam taraf tingkat pendidikan SLTA. Sedangkan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi baik yang Sarjana maupun Diploma berada dalam taraf 20 %.



Untuk peningkatan kemampuan pegawai secara teknis maupun fungsional, maka Kecamatan Hulu Gurung telah berupaya untuk mengikutsertakan pegawainya dalam berbagai kegiatan kediklatan baik berupa kursus, pelatihan, workshop, seminar maupun lokakarya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Pemanfaatan berbagai kegiatan baik yang telah diprogram oleh Pemerintah Kabupaten serta Dinas terkait, maupun Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien oleh Kecamatan Hulu Gurung guna peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Dalam rangka mendukung upaya tersebut tentunya diperlukan sumber pendanaan yang memadai. Walaupun sampai saat ini untuk Kecamatan Hulu Gurung tidak disediakan dana khusus pelatihan.

#### **3.4.2 Sarana dan Prasarana**

Kondisi Gedung Kantor Camat Hulu Gurung dalam keadaan rusak sehingga perlu dilakukan Pembangunan Gedung baru atas bangunan yang digunakan, karena bangunan yang digunakan sampai saat ini adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1988 sehingga untuk kondisi sekarang sudah tidak cocok lagi mengingat sudah banyak ruangan yang rapuh dan perlu segera mendapatkan perbaikan mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini sudah beberapa kali Kantor Camat Hulu Gurung terendam oleh banjir sehingga semakin memperparah kerusakan yang diakibatkan oleh factor usia bangunan .

#### **3.4.3 Sumber Daya Keuangan**

Sebagai salah satu bentuk sumber daya (*resources*), maka faktor pendanaan (*money*) amat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas suatu unit organisasi. Dukungan pendanaan yang memadai dengan pemanfaatan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai positif dalam penentuan kinerja unit kerja. Berdasarkan data sumber daya keuangan yang telah tergambar sebelumnya yaitu sumber pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi fluktuasi jumlah anggaran Kecamatan Hulu Gurung.





### 3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Agar strategi Kecamatan Hulu Gurung dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif, efisien dan dapat tercapai maka perlu ditetapkan terlebih dahulu factor-faktor kunci keberhasilan ( *Key Succes Factors* ), yang mana dapat diidentifikasi dari :

#### 3.5.1 Kekuatan dan Kelemahan

#### 3.5.2 Tantangan dan Kendala

Salah satu Instrumen untuk mengukur kunci keberhasilan digunakan adalah analisi SWOT ( *Strength, Weaknes, Opportunnities , Threacts* ). Analisa swot ini dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal . Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( *strength* ) dan peluang ( *opportunities* ), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( *weaknes* ) dan ancaman ( *threats* ). Dengan analisa swot , dapat diidentifikasi setiap potensi peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.

### 3.6 Tantangan Pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Hulu Gurung meliputi :

- a. Luas wilayah
- b. Minimnya personil pendukung
- c. Kuantitas sarana pendukung yang minim

### 3.7 Peluang Pengembangan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan pada Kecamatan Hulu Gurung , meliputi:

- a. Kebijakan pembangunan SDM dalam rangka nawacita Presiden republik Indonesia
- b. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap Pelayanan Publik.
- c. Mendorong peningkatan profesionalisme Aparatur Negara.



Tingkat kinerja yang diinginkan adalah kinerja yang ingin dicapai guna kesempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi. Adapun tingkat kinerja yang diinginkan oleh Kecamatan Hulu Gurung adalah sebagai berikut :

1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi ketatausahaan
2. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan
3. Indeks kepuasan pegawai terhadap pemberian penghargaan/insentif bagi staf yang memiliki beban kerja lebih.
4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok di luar dan di dalam daerah.
5. Indeks kepuasan pegawai terhadap pembinaan kemasyarakatan.

### **3.8 Kondisi Yang Diinginkan**

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut , maka diperlukan beberapa sumber daya yang harus ada agar semuanya dapat dicapai secara optimal yaitu :

#### **3.8.1 Sumber Daya Manusia**

Adanya kesesuaian jenjang pendidikan formal pegawai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat pendidikan serta spesifikasi pendidikan harus disesuaikan dengan tugas. Berdasarkan tingkatan pendidikan, kondisi kinerja yang telah ada dimana dapat disimpulkan kondisi tersebut baru 60%, karena untuk mengisi tenaga Kepala Seksi dan Kasubbag kedepan perlu pendidikan minimal D-III . Penempatan pegawai yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Kecamatan Hulu Gurung merupakan harapan yang harus direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kedepan. Karena ada beberapa jabatan yang belum terisi berdasarkan SOTK yang ada, terutama jabatan teknis yang memang harus diisi oleh pegawai yang berpendidikan D-III ataupun berpendidikan S1, Sehingga kinerja dan profesionalitas staf bisa lebih meningkat.

Kesesuaian jenjang pendidikan dan latihan (Diklat) Struktural dengan formasi jabatan struktural yang tersedia. Idealnya (100%) tiap pejabat dalam jenjang jabatan struktural tertentu telah mengikuti Diklat Struktural yang





diwajibkan. Ini akan sangat berguna terutama dalam kaitannya dengan manajemen pelaksanaan tugas serta daya analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam tiap tingkatan jabatan.

Guna peningkatan kemampuan dan kapasitas tiap pegawai Kecamatan Hulu Gurung terutama secara teknis fungsional, maka program diklat yang bersifat aplikatif harus terus dilaksanakan. Hal ini terutama untuk terus meningkatkan kemampuan personil yang ada juga untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi baik dalam hal regulasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan. Percepatan alih ilmu pengetahuan (*transfer knowledge*) menjadi keharusan dalam menghadapi berbagai tantangan akan perubahan yang terus bergulir. Berbagai kegiatan kediklatan teknis fungsional yang bersifat aplikatif guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Hulu Gurung yang seharusnya diikuti (kondisi ideal 100%) oleh sumber daya manusia yang ada, diantaranya:

- ✓ Diklat pengelolaan keuangan
- ✓ Diklat Kearsipan
- ✓ Diklat Pengelolaan Barang
- ✓ Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan
- ✓ Diklat Manajemen Pemerintahan, serta
- ✓ Diklat lainnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

### 3.8.2 Sumber Daya Keuangan

Sebagai upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas penyelenggara pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur – unsur yang menjadi tugasnya, maka idealnya jumlah anggaran setiap tahunnya harus mengalami kenaikan secara progresif minimal 100 % tiap tahunnya yang terakomodir pada tiap – tiap seksi dan sub bagian, sehingga diharapkan jumlah anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal, ekonomis, efektif dan efisien oleh Kecamatan Hulu Gurung. Tetapi dana yang ada pada saat ini hanyalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas



---

saja seperti ATK dan honorarium pejabat pengelola keuangan saja, kedepan diharapkan dana untuk pemerintah kecamatan bisa ditingkatkan sehingga bukan hanya kegiatan rutinitas saja yang di biyai tetapi juga bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### 3.8.3 Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kegiatan Kantor Kecamatan Hulu Gurung , maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana. Pembangunan gedung baru hingga taraf yang representatif (100%) serta penataan ruang yang baik guna mendukung kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Hulu Gurung mutlak dilaksanakan. Dengan demikian sangat di harapkan untuk masa yang akan datang perlu dilakukan pembenahan sarana dan prasarana yang lebih baik agar tercapai kelayakan dan kenyamanan untuk sebuah Kantor baik bagi Pegawai yang melaksanakan tugas didalam kantor maupun untuk masyarakat yang menerima pelayanan. Apalagi Kecamatan Hulu Gurung merupakan salah satu Kecamatan yang berada di jalur lintas selatan dan kondisi kantor sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan.





---

## BAB IV

### VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijakan dan Program yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin komplek. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*) yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dalam usaha menuju suatu kondisi yang lebih baik, Kecamatan Hulu Gurung harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan, serta mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depan Kecamatan Hulu Gurung , membangun standar operasional dan prosedur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, serta menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya berupa indikator kinerja keluaran (*outputs*) dan atau kinerja hasil (*outcomes*).

#### 4.1 VISI

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Mengacu pada prinsip tersebut diatas, maka dapat di buat suatu pengertian mengenai Visi yaitu : sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai , arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan



dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut, sehingga visi yang ditetapkan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- c. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi.
- d. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya.
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.
- f. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi Bupati terpilih Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yakni Visi : " **TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL – KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT** "

Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan terampil. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan dibawah ini :

- a. **Harmonis** Mengandung makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
- b. **Energik** mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan pendapatan per kapita penduduk yang terdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;





- c. **Berdaya Saing** mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, kompetitif serta berwawasan ke depan;
- d. **Amanah** mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik mengandung unsur partisiatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. **Terampil** mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang tgeruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

#### **4.2 MISI**

Misi merupakan acuan/pedoman yang harus diemban dan dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dengan pernyataan misi diharapkan seluruh jajaran Kantor Camat Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak masyarakat mengetahui dan mengenal keberadaan Kantor Camat Hulu Gurung, dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan kantor Camat Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih eksis dan konsekuen melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Misi Kecamatan Hulu Gurung dengan berpedoman kepada misi Bupati / Wakil Bupati terpilih 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;



4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka misi keempat adalah misi utama yang harus diemban oleh Kecamatan Hulu Gurung yaitu

***" Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas "***





## BAB V

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan outcomes dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan haruslah memperhatikan :

- Rumusan Tujuan harus cukup jelas
- Rumusan Tujuan harus diselaraskan dengan Visi dan Misi Instansi
- Rumusan Tujuan harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instans
- Rumusan Tujuan harus mempertimbangakn faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*)
- Rumusan Tujuan harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai
- Rumusan Tujuan harus mengakomodasi issue strategis yang dihadapi
- Rumusan Tujuan harus mencerminkan “Core Area” dimana organisasi berperan.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka



waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

## 5.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kabupaten Kapuas Hulu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja *'impact'* yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat yang aman, relegius dan berbudaya.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan jumlah desa mandiri.
4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka;
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah.





Tujuan dan sasaran pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap pelaksanaan kegiatan agar tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Untuk lebih jelas mengenai kebijakan yang ditempuh Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Kebijakan yang ditempuh Sekretariat Kecamatan adalah Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya.

2. Seksi Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh seksi Pemerintahan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang baik diarahkan melalui pembinaan pemerintahan desa dan penataan pemerintahan, pengembangan wilayah pemerintahan serta koordinasi antar instansi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kebijakan yang ditempuh Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah Mendorong pola pemberdayaan masyarakat.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan yang di tempuh seksi Kesejahteraan Sosial adalah Perlindungan dan kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang memperhatikan keserasian kebijakan nasional dan daerah serta kesetaraan gender.



### **5.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :





**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Hulu Gurung – Kabupaten Kapuas Hulu**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target kinerja tujuan / sasaran pada tahun ke -				
						2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>VISI : KAPUAS HULU SEMAKIN HEBAT</b>									
	<b>MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.</b>									
4.1	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Hulu Gurung	Nilai SAKIP	Predikat	CC	CC	CC	CC	B B



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program yang perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok. Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan pokok di lingkungan Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan mengacu kepada RPJMD Bupati/Wakil Bupati terpilih tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan yaitu :

**1. Misi pertama, Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan**

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam dan kompleks sehingga perlu keasadaran hidup secara selaras dan harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan keberagaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah keberagaman di Kapuas Hulu perlu diwujudkan. Kehidupan masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks) atau informasi yang bersifat provokatif. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menciptakan keamanan swakarsa dan mebina pengembangan komunitas religius dan budaya masyarakat
- b. Melibatkan tokoh masyarkat dan aparat dalam mendukung program pengamanan swakarsa
- c. Menumbuhkan kesadaran masyarakat kabupaten Kapuas Hulu, terhadap anti-diskriminasi, terorisme dan paham radikal





- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik serta budaya gotong royong
  - e. Memberikan apresiasi di bidang agama, seni dan budaya tradisional
  - f. Mengembangkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya
  - g. Melakukan pembinaan terhadap kelompok kesenian, organisasi sosial dan membentuk forum pembaruan kebangsaan.
- 2. Misi kedua, Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi**

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah masih bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan menengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu. Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM.

Peningkatan nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan sebagai basis ekonomi kerakyatan.



- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional
  - c. Membangun tata kelola niaga hasil industri kecil dan menengah menuju pasar ekspor.
  - d. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - e. Menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
  - f. Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi dan menumbuh-kembangkan dunia usaha kecil dan menengah.
  - g. Menyediakan aksesibilitas dan pengembangan lembaga keuangan untuk pengembangan dunia usaha yang produktif
  - h. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan parasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
  - i. Mengembangkan kawasan agropolitan, pariwisata dan perikanan.
  - j. Mendorong dan meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  - k. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19.
- 3. Misi ketiga, Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing**

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan





kemajuan teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif. Di masa pandemi, kualitas pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memenuhi standar nasional.
  - b. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
  - c. Menyiapkan program pendidikan yang berbasis kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar.
  - d. Membebaskan biaya pendidikan dasar dan bantuan pendidikan kepada pelajar dan mahasiswa.
  - e. Mengembangkan pendidikan non-formal dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekan angka buta huruf
  - f. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan.
  - g. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, membangun sekolah unggulan, serta asrama pelajar dan mahasiswa, dan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Kebudayaan.
  - h. Mengoptimalkan pendokumentasian kebudayaan sebagai panduan melakukan akselerasi kapitalisasi modernisasi kebudayaan dalam pembangunan.
- 4. Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas**

Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. dengan memperbaiki tata kelola



pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
- b. Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
- c. Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
- d. Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan e-government
- f. Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi.
- g. Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
- h. Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
- i. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.





#### **5. Misi kelima, Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 s/d 2023 serta terakhir pencegahan stunting yang dilakukan pencegahan dini mulai dari ibu hamil sampai anak balita . Mutu pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Mengoptimalkan pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
- b. Menerapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga medis yang profesional
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan.
- e. Membangun rumah singgah bagi masyarakat miskin yang sakit, dan ibu hamil dari pedalaman.
- f. Meningkatkan pelayanan jaringan kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam pengentasan stunting/gizi buruk.
- g. Mengoptimalkan sarana dan prasana penunjang pelayanan kesehatan di dusun, desa, dan kecamatan.

Dalam tabel berikut adalah gambaran rencana program, kegiatan dan pendanaan Kecamatan Hulu Gurung tahun 2025- 2029 :

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
- Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	87.50	87.65	87.70	87.80	88	
			Predikat SAKIP	87.60	87.65	87.70	87.80	88	
		Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Nilai survey kepuasan masyarakat	87.50	87.65	88.00	88.67	89.00	
		Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unsur Perencanaan Kinerja	87.50	87.65	88.00	88.67	89.00	



**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					2.899.891.000,00		7.351.970.000,00		2.830.320.000,00		7.247.507.000,00		2.862.470.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.720.470.000,00		7.158.720.000,00		2.621.720.000,00		7.016.220.000,00		2.614.220.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	Tersedianya Dokumen RKA (Dokumen)	24	9	9	2.720.470.000,00	9	7.158.720.000,00	9	2.621.720.000,00	9	7.016.220.000,00	9	2.614.220.000,00	Dinas/Instansi yang menangani Sistem Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					172.215.000,00		182.500.000,00		195.300.000,00		215.650.000,00		230.000.000,00	
Meningkatnya Koordinasi , Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan (Dokumen)	12	12	12	172.215.000,00	12	182.500.000,00	12	195.300.000,00	12	215.650.000,00	12	230.000.000,00	Dinas/Instansi yang menangani Sistem Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					2.899.891.000,00		7.351.970.000,00		2.830.320.000,00		7.247.507.000,00		2.862.470.000,00	



**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				2.902.391.000,00		7.360.970.000,00		2.832.820.000,00		7.250.007.000,00		2.864.970.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.722.970.000,00		7.167.720.000,00		2.624.220.000,00		7.018.720.000,00		2.616.720.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	Tersedianya Dokumen RKA	24	9	2.722.970.000,00	9	7.167.720.000,00	9	2.624.220.000,00	9	7.018.720.000,00	9	2.616.720.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	6	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24	9	1.250.000,00	9	1.250.000,00		1.250.000,00	9	1.250.000,00	9	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24	9	1.250.000,00	9	1.250.000,00		1.250.000,00	9	1.250.000,00	9	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	10	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.259.410.000,00		2.259.410.000,00		2.259.410.000,00		2.259.410.000,00		2.259.410.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				86.800.000,00		86.800.000,00		86.800.000,00		86.800.000,00		86.800.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	12	86.800.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.169.980.000,00		2.169.980.000,00		2.169.980.000,00		2.169.980.000,00		2.169.980.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	29	2.169.980.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.130.000,00		1.130.000,00		1.130.000,00		1.130.000,00		1.130.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	10	1.130.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	18	1.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	4	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				135.630.000,00		99.536.000,00		99.536.000,00		99.536.000,00		99.536.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	2	18.000.000,00	3	29.656.000,00	3	29.656.000,00	3	29.656.000,00	3	29.656.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18.000.000,00		29.656.000,00		29.656.000,00		29.656.000,00		29.656.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	2	18.000.000,00	3	29.656.000,00	3	29.656.000,00	3	29.656.000,00	3	29.656.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	22	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	2	92.880.000,00	1	45.130.000,00	1	45.130.000,00	1	45.130.000,00	1	45.130.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				92.880.000,00		45.130.000,00		45.130.000,00		45.130.000,00		45.130.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	2	92.880.000,00	1	45.130.000,00	1	45.130.000,00	1	45.130.000,00	1	45.130.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	29	23.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				97.500.000,00		105.000.000,00		103.500.000,00		104.000.000,00		103.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	4.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	4.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	49.000.000,00	12	47.000.000,00	12	47.500.000,00	12	47.000.000,00	12	47.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.000.000,00		47.000.000,00		47.500.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	49.000.000,00	12	47.000.000,00	12	47.500.000,00	12	47.000.000,00	12	47.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	6	8.000.000,00	7	8.000.000,00	5	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	6	8.000.000,00	7	8.000.000,00	5	8.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	14	2.500.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	14	2.500.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	20	19.000.000,00	25	22.000.000,00	20	20.000.000,00	20	21.000.000,00	20	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.000.000,00		22.000.000,00		20.000.000,00		21.000.000,00		20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	20	19.000.000,00	25	22.000.000,00	20	20.000.000,00	20	21.000.000,00	20	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	19	15.000.000,00	20	18.000.000,00	20	18.000.000,00	20	18.000.000,00	20	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	19	15.000.000,00	20	18.000.000,00	20	18.000.000,00	20	18.000.000,00	20	18.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				118.100.000,00		91.744.000,00		48.644.000,00		93.844.000,00		40.544.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	36.000.000,00	1	25.000.000,00	0	-	1	25.000.000,00	0	-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				36.000.000,00		25.000.000,00		-		25.000.000,00		-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	36.000.000,00	1	25.000.000,00	0	-	1	25.000.000,00	0	-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	6	82.100.000,00	5	50.744.000,00	4	48.644.000,00	5	50.844.000,00	4	40.544.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.100.000,00		50.744.000,00		48.644.000,00		50.844.000,00		40.544.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	6	82.100.000,00	5	50.744.000,00	4	48.644.000,00	5	50.844.000,00	4	40.544.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	2	16.000.000,00	0	-	2	18.000.000,00	0	-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		16.000.000,00		-		18.000.000,00		-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	2	16.000.000,00	0	-	2	18.000.000,00	0	-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.080.000,00		96.780.000,00		96.880.000,00		96.680.000,00		96.980.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	12	1.400.000,00	12	1.600.000,00	12	1.700.000,00	12	1.500.000,00	12	1.800.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000,00		1.600.000,00		1.700.000,00		1.500.000,00		1.800.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	12	1.400.000,00	12	1.600.000,00	12	1.700.000,00	12	1.500.000,00	12	1.800.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	22.000.000,00	12	22.500.000,00	12	22.500.000,00	12	22.500.000,00	12	22.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				22.000.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00		22.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	22.000.000,00	12	22.500.000,00	12	22.500.000,00	12	22.500.000,00	12	22.500.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				72.680.000,00		72.680.000,00		72.680.000,00		72.680.000,00		72.680.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	12	72.680.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.000.000,00		4.509.000.000,00		10.000.000,00		4.359.000.000,00		11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	2	4.500.000.000,00	0	-	2	4.350.000.000,00	0	-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		4.500.000.000,00		-		4.350.000.000,00		-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	2	4.500.000.000,00	0	-	2	4.350.000.000,00	0	-	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	5	5.000.000,00	4	4.000.000,00	5	5.000.000,00	4	4.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	5	5.000.000,00	4	4.000.000,00	5	5.000.000,00	4	4.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.137.000,00		1.250.000,00		1.300.000,00		1.137.000,00		1.250.000,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				1.137.000,00		1.250.000,00		1.300.000,00		1.137.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.137.000,00		1.250.000,00		1.300.000,00		1.137.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	1.137.000,00	12	1.250.000,00	12	1.300.000,00	12	1.137.000,00	12	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.137.000,00		1.250.000,00		1.300.000,00		1.137.000,00		1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	1.137.000,00	12	1.250.000,00	12	1.300.000,00	12	1.137.000,00	12	1.250.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				172.215.000,00		182.500.000,00		195.300.000,00		215.650.000,00		230.000.000,00		
Meningkatnya Koordinasi , Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kebijakan Strategi di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	12	12	172.215.000,00	12	182.500.000,00	12	195.300.000,00	12	215.650.000,00	12	230.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				71.715.000,00		78.500.000,00		74.800.000,00		73.500.000,00		75.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	10	2.750.000,00	10	3.500.000,00	10	3.800.000,00	10	4.500.000,00	10	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	12	68.965.000,00	12	75.000.000,00	12	71.000.000,00	12	69.000.000,00	12	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				2.750.000,00		3.500.000,00		3.800.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15	16	2.750.000,00	10	3.500.000,00	10	3.800.000,00	10	4.500.000,00	10	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				68.965.000,00		75.000.000,00		71.000.000,00		69.000.000,00		70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	12	68.965.000,00	12	75.000.000,00	12	71.000.000,00	12	69.000.000,00	12	70.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100.500.000,00		104.000.000,00		120.500.000,00		142.150.000,00		155.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	10	100.500.000,00	10	104.000.000,00	10	120.500.000,00	10	142.150.000,00	10	155.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				100.500.000,00		104.000.000,00		120.500.000,00		142.150.000,00		155.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10	10	100.500.000,00	10	104.000.000,00	10	120.500.000,00	10	142.150.000,00	10	155.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.069.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat				1.069.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1.069.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terdaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25	12	1.069.000,00	12	2.500.000,00	12	3.000.000,00	12	3.500.000,00	12	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1.069.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terdaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25	12	1.069.000,00	12	2.500.000,00	12	3.000.000,00	12	3.500.000,00	12	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku				3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Agama dan Ras dan Golongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	90	1.000.000,00	100	1.500.000,00	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	100	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	100	3.000.000,00	100	3.500.000,00	100	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	100	3.000.000,00	100	3.500.000,00	100	4.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	90	1.000.000,00	100	1.500.000,00	100	2.000.000,00	100	2.500.000,00	100	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi				2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta Meningkatkan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dan Fasilitas Penataan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	15	1.000.000,00	15	1.500.000,00	15	2.000.000,00	15	2.500.000,00	15	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	15	1.000.000,00	15	1.500.000,00	15	2.000.000,00	15	2.500.000,00	15	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	15	1.000.000,00	15	1.500.000,00	15	2.000.000,00	15	2.500.000,00	15	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1.000.000,00		1.500.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	15	1.000.000,00	15	1.500.000,00	15	2.000.000,00	15	2.500.000,00	15	3.000.000,00	7.01.0.00.0.00.13.00 00 - KECAMATAN HULU GURUNG	



**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Predikat SAKIP	Predikat	86,94	87,00	87,60	87,65	87,70	87,80	88,00	



---

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu periode 2025 – 2029 merupakan acuan bagi Kecamatan Hulu Gurung dalam menggerakkan segala sumber daya yang dimilikinya guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu periode 2025 – 2029 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara *internal stakeholders* baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada yang tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu periode 2025 – 2029 tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Hulu Gurung sebagai penyelenggara dan pembina pemerintahan desa, pembangunan dalam pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta penyelenggara koordinasi atas kegiatan pelaksanaan unsur – unsur Pemerintah Kapuas Hulu yang menjadi tugasnya. Karena pada dasarnya apa yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Hulu Gurung periode 2025 – 2029 merupakan cita-cita yang ingin dicapai yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan Renstra/RPJM dirumuskan indikator program sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra/RPJM setiap tahunnya, indikator program tersebut juga merupakan indikator di tingkat sasaran dimana program tersebut ditempatkan, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program- program yang termuat dalam Renstra/RPJM Periode 2025 – 2029 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk RKPD.





Dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT , semoga penjabaran visi dan misi yang ada dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat dipakai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Hulu Gurung di masa yang akan datang.

Nanga Tepuai, Juni 2025

**CAMAT HULU GURUNG,**



  
Drs. H. BAHARUDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 19670718 199503 1 002